

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NTT
TAHUN 2025

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
1	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen Keuangan : - SPJ berikut lampirannya, - Dokumen anggaran - Surat pencairan anggaran. b. Memorandum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
2	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2).	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
3	Daftar User dan Password Aplikasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; 3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan	1. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang 2. Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	1. Melindungi data Pribadi ; 2. Melindungi dan mengamankan perangkat data
4	Surat-surat / memo / memorandum / nota dinas / disposisi yang sifatnya rahasia	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Sampai dengan proses selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Menghindari kesalahan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga Privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
6	Data hasil evaluasi kinerja ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga Privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
7	Data rencana penempatan ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	1. Proses penyusunan kebijakan tidak terganggu
8	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Proses penyusunan kebijakan/Kesuksesan kebijakan tidak terganggu

9	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	SK Pengangkatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan /menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
11	Keputusan Keputusan Penjatuhan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	1. Dapat mengganggu proses penegak hukum 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	1. Membantu kelancaran proses penegakan hukum 2. Melindungi rahasia pribadi seorang PNS 3. Mengamankan proses penyusunan kebijakan
12	Dokumen Pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian).	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia
13	Daftar Nilai SKP ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Laporan Keuangan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTT (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
15	Kertas kerja pemeriksaan, pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
16	Laporan Realisasi Anggaran	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
17	Catatan Atas Laporan Keuangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 500.12.6.5/03/Kukm

Pada hari ini Jumat Tanggal 14 Bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
		Dibuka	Ditutup	
Berita acara pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penggunaan untuk Kepentingan pihak-pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak	Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan

	Keterbukaan Informasi Publik	bertanggung jawab	dapat merugikan ASN atau Instansi	
Data pribadi peserta pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Tidak terbatas
Dokumen penawaran kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas
Disposisi Pimpinan yang klasifikasinya bersifat sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
Data Rencana CPNS/PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penyusunan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK kepada PNS/CPNS
Hasil Keputusan Rapat Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Sampai Keputusan Rapat

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disimpulkan pada table di atas dilakukan oleh

N o	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si	Kepala Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 198803 1 018

PARAF HIERARKI

Plt. Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	